

UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM DAN KEMANDIRIAN BANGSA

Oleh : Acim Supriadi, SE.,MM
(DPL KKN Desa Cibadak Juli Tahun 2022)

Sejak badai Corona Virus 19 menimpa Negara-negara di Dunia, termasuk negeri kita Indonesia, berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian kita dan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia, menurut sumber data, “Hasil simulasi SMERU menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada 2020 akan mencapai 12,24% (meningkat dari 9,2 % pada September 2019), Artinya akan ada 8,5 juta orang miskin baru. Tingkat kemiskinan sebesar 12,4 % sama dengan angka pada 2011. Dengan kata lain, jika proyeksi tersebut benar-benar terjadi priogres pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan akan kembali ke kondisi pada 2011 (Smeru.or.id, 15 Juni 2020). Dan menurut pengakuan menurut pernyataan Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian, 27 Jan. 2022) ,... bahwa tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan mengalami kenaikan tajam akibat dampak pandemi ini.

Harapan kita, pemerintah dapat segera mengatasi krisis yang berpotensi berkepanjangan ini dengan menggalakkan pembangunan di berbagai sector meskipun tantangan berat harus dihadapi, mengingat antara lain, kondisi masyarakat kita yang masih serba ter-tinggal, baik di bidang penguasaan ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi. Apalagi, pada saat sekarang ini era pasar bebas untuk kawasan ASEAN sejak tahun 2003. Dan Asia Pasifik atau APEC mulai sejak tahun 2020. Sehingga, disadari atau tidak disadari, kita dituntut untuk berpacu dan bersaing dengan masyarakat diberlakukan sejak di Negara-negara lain yang sudah maju. “Karena bagaimanapun pada era globalisasi ini – *tak akan pernah memberi peluang bagi yang ketinggalan untuk mengejar, dan tak akan pernah pula menahan yang lebih maju untuk dikejar.* Dengan kata lain ; semua harus mampu bersaing bebas untuk mencapai keunggulan” (Acim Supriadi dalam Anak Bangsa Menggugat – Nasionalisme, Kemandirian dan Kewirausahaan (2003: 207-208).

Yang menjadi pertanyaan, adalah akankah upaya pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai kelompok terbesar dan juga potensi terbesar dalam perputaran kegiatan ekonomi nasional dan dapat membantu dunia usaha kita, mampu memperluas lapangan kerja, memberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat

Karawang, 28 Februari 2023

berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan sekaligus dapat bersaing di tengah suasana global yang pada akhirnya menjadikan negeri Indonesia tercinta ini sebagai bangsa yang mandiri?

Hikmah Pengalaman Masa Lalu

Tentunya, Kita tidak menutup mata terhadap pengalaman masa lalu, Acim Supriadi, dalam **Tim Redaksi Redkasi LP3ES** (2003 : 208 -211), keberhasilan model pembangunan yang pernah diterapkan oleh penguasa Orde Baru tempo lalu, atau boleh dibilang “suatu keberhasilan” yang pernah diraihinya, yaitu pada masa jayanya dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJP Tahap II) telah menggoreskan “*tinta emas keberhasilan pembangunan yang mengesankan*”. Ketika itu meningkatnya pendapatan perkapita nasional, swasembana pangan dan prestasi lainnya yang pernah diperolehnya selama rentang waktu dua puluh lima tahun terakhirnya ; Hal tersebut ditandai oleh munculnya perusahaan-perusahaan besar atau “perusahaan konglomerasi’ yang mendominasi perekonomian nasional.

Dimana model pembangunan yang diterapkan ketika itu memang dititikberatkan kepada sasaran pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) semata. Namun demikian, strategi pembangunan tersebut telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Posisi perekonomian Indonesia yang tadinya berstatus “pendapatan rendah” telah naik tingkat menjadi “pendapatan menengah”, dan telah terjadi pergeseran dari struktur pertanian menjadi struktur industri. Begitu juga pembangunan prasarana dan sarana umum, transportasi dan komunikasi, listrik dan kesejahteraan sosial, pendidikan dan lain-lain telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

Akan tetapi, model pembangunan tersebut telah meminta pengorbanan yang besar berupa utang luar negeri yang sudah mencapai US \$ 100 milyar, dan terus berkelanjutan yang jumlahnya kian membengkak dari tahun ke tahun, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta yang kemudian sukar dikendalikan (jumlahnya mencapai hingga US \$ 140 milyar). Dengan banyak kemudahan dan kesempatan ketika itu modal luar negeri terus mengalir masuk ke Indonesia – bersama membesarnya sekelompok kecil perusahaan besar dan perusahaan konglomerasi yang mengeksploitasi kekayaan alam yang melimpah tanpa batas, dan memanfaatkan tenaga buruh dengan upah rendah. Kelompok kecil – pengusaha besar dari perusahaan konglomerat tersebut bermitra dengan investor asing atau menjadi

perpanjangan tangan dari perusahaan – perusahaan multinasional termasuk “Overseas Chinese”. Secara otomatis kehidupan perekonomian bangsa Indonesia dapat mereka kuasai, sementara distribusi pendapatan semakin timpang yang pada gilirannya berdampak pada semakin tertinggalnya perekonomian sector Negara, sector usaha kecil dan menengah dan koperasi, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan social.

Dalam situasi demikian, maka praktik monopoli dan oligopoly berlangsung sehingga menggeser ruang lingkup usaha Perusahaan Negara dan Perekonomian Rakyat (UMKM dan Koperasi). Begitu juga praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) demi kepentingan pribadi tumbuh subur antara pengusaha dan oknum-oknum pejabat pemerintahan. Dan struktur sosial ekonomi yang terbentuk sebagai hasil penerapan model pembangunan di atas, adalah berbentuk “piramida” ; yang mayoritasnya adalah lapisan masyarakat kelas bawah, lalu diikuti kelas menengah dan kelas atas.

Sebenarnya mengenai ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial itu telah ditenggerain oleh peneliti senior LIPI, **Mochtar Pabotinggi**, pada tahun 1994 – yang mengatakan : “Pembangunan ekonomi sosial selama lima tahun terakhir ini telah menguntungkan 1 % saja dari penduduk Indonesia yang kala itu berjumlah 185 juta orang – tetapi mereka menikmati 80 % dari pendapatan nasional dan mereka itu kebanyakan warga Negara keturunan China, sedangkan 99 % penduduk dari golongan menengah ke bawah sebagai minoritas dirugikan dan hanya mendapat 20 % saja dari pendapatan nasional” (Seminar LIPI : *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, 15 Januari 1994).

Dengan berkaca pada masa lalu, banyak hikmah yang dapat kita petik untuk menentukan langkah ke depan yang lebih baik, antara lain : *Pertama*, fakta menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang keberadaannya difasilitasi /didanai dengan pinjaman (dalam negeri dan luar negeri) ternyata tak berdaya, bahkan terlibas oleh krisis moneter (1998). Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya kebijakan industrialisasi pemerintah yang berorientasi pada penentuan dan dukungan terhadap produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Jadi hanya sekedar membangun industri. Padahal di bidang pertanian, misalnya, banyak yang dapat dijadikan produk unggulan karena kita memiliki sumber daya alam yang melimpah yang didukung oleh iklim yang baik, pengalaman dan jumlah tenaga kerja yang meimpah. *Kedua*, bahwa model pembangunan di masa mendatang harus menghasilkan struktur sosial ekonomi yang ideal, atau “berbentuk

Karawang, 28 Februari 2023

belah ketupat” yang didominasi oleh masyarakat menengah, dengan sedikit kelas atas dan kelas bawah di kedua ujungnya, yang bermakna, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial mengecil. Artinya apa? Ini berarti kita harus mengubah model pembangunan menjadi berpihak kepada perekonomian rakyat (pengusaha UMKM dan Koperasi yang berasal dari sebagian besar rakyat Indonesia), tetapi tanpa mengenyampingkan perusahaan-perusahaan besar sepanjang peranannya tidak menggeser ruang lingkup UMKM dan Koperasi.

Tema KKN Hybrid UBP Karawang Tahun 2022

Berkenaan dengan KKN hybrid UBP Karawang tahun 2022, yang terdiri dari 84 desa dan 16 kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Karawang, dengan mengusung tema : “inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri”.

Menurut Iqbal Bahtiar (Kompasiana.com, 5 Juli 2022), menjabarkan makna tema KKN tersebut. Inovasi secara sederhana bermakna ide, gagasan untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai pengembangan (*improvement*) dari sistem yang telah ada atau sama sekali baru. Digitalisasi dimaksudkan adalah pengalihan dari sistem yang konvensional menjadi sistem yang terkomputerisasi (*digital*). Sedangkan masyarakat mandiri dimaksudkan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai ketahanan yang tangguh terutama pada sector ekonomi. Sedangkan rangkaian tema di atas bagi mahasiswa mempunyai maksud, bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan dapat membantu para pelaku usaha di desa untuk dapat menciptakan suatu pengembangan baik pada produk maupun proses bisnis yang dilakukan, dan mengkonversikan aktivitas konvensional/normal menjadi sistem yang terkomputerisasi sehingga pada gilirannya kelak akan tercapai ketahanan perekonomian masyarakat yang mandiri.

Menurut penjelasan PP RI Nomor 17 Tahun 2013, tentang pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM; **Umum** : ... UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada

Karawang, 28 Februari 2023

aktivitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dan, Pasal 3 Ayat (1) : Pengembangan UMKM dimaksudkan untuk mewujudkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah, dan Usaha Menengah menjadi Usaha Besar yang tangguh dan mandiri.

Tim KKN Mahasiswa UBP Karawang di Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta

Untuk tim KKN mahasiswa UBP Karawang di Desa Cibadak, Diko dan 17 mahasiswa lainnya, semuanya berjumlah 18 orang (Terdiri dari : Prodi Manajemen (5 orang); Prodi Akuntansi (2 orang); Prodi Teknik Industri (3 orang); Prodi Farmasi (1 orang); Prodi Teknik Mesin (1 orang); Prodi Teknik Informasi (1 orang); Prodi Sistem Informasi (1 orang); Prodi PGSD (1 orang); dan Prodi Ilmu Hukum (1 orang).

Pertama telah melaksanakan sosialisasi program KKN (oleh Diko dan rekan) dengan melakukan silaturahmi mendatangi para ketua RT /RW di lingkungan Desa Cib, adak. Langkah berikutnya adalah inventarisasi bidang-bidang usaha, UMKM. Ada beberapa jenis usaha yang dilakukan para pengusaha kecil, UMKM, seperti : Pengrajin pembuatan seeng dari tembaga, Gymsun, Sablon, konpeksi, depot air isi ulang, pembuatan ranginang (salah satunya dikelola oleh ibu Entin dan Manisan /Asinan Jambu Kristal (Milik H. Bakri); dalam operasi usaha kedua produk tersebut digandeng oleh Tim PKK Desa Cibadak. Dengan demikian kedua produk tersebut, menjadi produk unggulan di desa Cibadak.

Kemudian kedua produk UMKM tersebut (Produk Rangenang – Ibu Entin dan produk manisan/ asinan Jambu Kristal) oleh Tim KKN (Diko dan rekan) melakukan inovasi dan digitalisasi. **Pertama** : Dilakukan perbaikan dengan mengubah bentuk *packing*-nya, dan diberi label yang lebih menarik. **Kedua** ; Dilakukan digitalisasi dengan membuat Akun sosial media, Akun *email* dan Akun *shopee*.

Ternyata kemudian, setelah dilakukan digitalisasi tersebut ada informasi positif dari produk Rangenang – Ibu Entin ; Dan, ibu Entin mengabari kepada Tim KKN (Diko dan rekan) , bahwa omzet permintaan /penjualan produknya menjadi meningkat. Tapi untuk produk Manisan /Asinan Jambu Kristal – H. Bakri belum ada informasi perkembangannya..

Paradigma Baru

Salah satu masalah berat Indonesia, dengan jumlah penduduk yang begitu besar (menurut databoks.katadata, co.id, pada pertengahan 2022 sekitar 275,77 juta), adalah masalah pengangguran. Menurut **Acim Supriadi**, dalam Tim Redaksi LP3ES (2003 : 211-213), sebagian diantara yang menganggur itu adalah tenaga kerja “intelektual (Sarjana)” yang masih muda. Banyaknya penganggur ini bisa dilihat dari beberapa sebab, antara lain, *Pertama* ; menganggur disebabkan tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai dengan tuntutan pasar kerja. *Kedua*, menganggur disebabkan memiliki tingkat pendidikan yang cukup tetapi tidak mendapatkan pasar sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Baik penyebab pertama maupun yang kedua, biasanya diiringi oleh kurangnya keterampilan . Kondisi ini membawa pengaruh negative pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Maka masalah yang kemudian menjadi tantangan adalah upaya pembinaan dan pengembangan “*kewirausahaan*”, khususnya bagi generasi muda. Bagi Indonesia tiada pilihan selain segera melakukan berbagai langkah konkret guna memperkuat struktur ekonomi dan bisnis dalam negeri yang salah satunya adalah pengembangan kewirausahaan. Tetapi menjadi wirausahawan itu tidak gampang, banyak kendala dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Misalkan saja, seseorang yang sudah lama menjadi pegawai negeri lalu disuruh pindah perusahaan swasta, pasti akan berpikir dulu, apalagi bila ia harus menjadi seorang wirausaha. Sebaliknya jika seseorang sudah lama bekerja diperusahaan swasta lalu disuruh pindah menjadi pegawai negeri, juga akan berpikir-pikir dulu. Maka untuk mengubah suatu kebiasaan atau menembus kendala-kendala yang ada dalam masyarakat diperlukan adanya paradigma baru.

Sebagai salah satu contoh konkret, menurut **Jen Z.A. Hans** dalam makalahnya yang berjudul : “*Seven Habits, Kanzen, dan Ajaran Islam*”. Di dalam masyarakat kita ada pameo yang sangat terkenal : “... hanya orang-orang etnis Cina yang dapat dan pintar berbisnis”, suatu pandangan yang semata-mata didasarkan oleh pertimbangan faktor genetic atau keturunan. Menurut pakar perilaku **Ivan Pavlov**, ada dua pola pikir “*determinisme*” yang dianut. **Pertama**, *genetic determinism*, yang intinya bahwa seseorang menjadi “*membre*” karena diwarisi gen-gen ke-*membre*-an di dalam kromosom sel-sel tubuh dari nenek moyangnya secara genetis (faktor keturunan). **Kedua**, *environmental determinism*, yang intinya bahwa seseorang menjadi *membre* disebabkan oleh faktor lingkungan. Kedua aliran

Karawang, 28 Februari 2023

tersebut sering dijadikan *excuse* (alasan) di dalam menjelaskan posisi keberadaan seseorang. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia dilahirkan telah diberi peluang yang sama oleh Tuhan, yaitu sebagai *pemenang*. Cobalah kita telaah kembali asal-usul kejadian manusia menurut ilmu medis (kedokteran) dan agama (islam), yaitu satu sel sperma dan satu sel telur. Sehingga sebenarnya sangat tidak etis apabila anugerah dari Tuhan sebagai “Sang Pemenang” ini disia-siakan begitu saja.

Perubahan atau transformasi struktur sosial ekonomi dari bentuk piramida ke bentuk belah ketupat dihadapkan pada kendala pola pikir determinisme yang mendominasi kalangan menengah dan bawah. Disamping itu, juga disebabkan oleh kondisi masyarakat kita yang masih serba tertinggal, baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan maupun penguasaan bidang teknologi.

Sumber daya alam yang melimpah, serta iklim tropis yang tersedia dari Sabang hingga Merauke (darat dan lautan), yang sejak kita di bangku Sekolah Dasar (SD) sudah diapresiasi sebagai ; “*Subur makmur, gemah ripah lohjinawi*”. Ternyata pada kenyataannya sampai sekarang, *tidak gemah ripah lohjinawi* (yang terjadi hanya pada sekelompok orang tertentu saja). Karena kita tidak bisa mengolahnya (tidak menguasai ilmu dan teknologinya), atau tidak mampu memberi nilai tambah yang memadai. Kita tidak bisa mengolah sumber daya alam menjadi produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar dunia. Hal ini berbeda sekali dengan Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia, bahkan pernah dibom atom oleh pihak sekutu (Amerika Serikat). Dan Jepang tidak pernah mengapresiasi kepada bangsanya *subur makmur*, tetapi *kerja keras*, karena memang keadaan alamnya menuntut demikian, selain adanya upaya yang terus menerus untuk menguasai ilmu dan teknologi agar tetap *survive*.(bertahan hidup).

Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian **Sri Hartati** dalam **M.Kwartono ADI** (2009 : 6-7), tentang dilemma sector informal pada tahun 2006, diperkirakan terdapat 90,36 % usaha mikro kecil dan 69,82 usaha ini masih mengandalkan modal sendiri yang terbatas. Bandingkan dengan Thailand yang memiliki bank khusus melayani para petani. Dan, berdasarkan catatan statistic BPS terdapat kurang lebih 50,76 juta (98,9%) unit usaha mikro di Indonesia. Dari seJumlah unit usaha tersebut terdiri dari 35,49 juta belum layak usaha dan bankable serta kira-kira 15,21 juta layak usaha dan belum bankable. Minimnya akses kredit juga membuat Karawang, 28 Februari 2023

UMKM sulit naik kelas. Dan, berdasarkan pengalaman Grameen Bank di tahun 1977 melayani 3,7 juta debitur di Banglades ; rumah tangga miskin yang secara terus menerus mendapatkan akses fasilitas kredit mikro mampu keluar dari garis kemiskinan dalam 5 tahun. Menurut kajian penelitian Departemen Pertanian juga mengungkapkan bahwa usaha mikro yang mendapat pelayanan keuangan, pendapatannya meningkat 15 % - 21,21,4% per bulan.

Memang kebanyakan dari UMKM ini biasanya terkendala oleh pemenuhan permodalan. Tetapi kendala tersebut menurut **M. Kwartono Adi** (2009 :3-4) kini telah banyak bentuk-bentuk bantuan modal yang digulirkan pada para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), antara lain : KUR (Kredit Usaha Rakyat), PNPM (Program Nasional Perberdayaan Masyarakat) , PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), Program CSR (corporate social responsibility), Unit Pelayanan Mikro Banking, dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Namun realitanya masih banyak yang belum dapat menikmati program tersebut. Beberapa faktor penghambatnya antara lain : (1) Hampir 90 % Pengusaha UMKM pada sector informal (pedagang kali lima dan *home industry*) yang notabene sering terpinggirkan dan kurang mendapat akses permodalan karena tidak punya agunan dan tidak punya tempat tinggal tetap; (2) Kurangnya informasi secara transparan kepada pengusaha kecil. Hal ini dapat dimengerti karena belum meratanya promosi secara kontinyu dan belum kompaknya kerja sama antar lintas sektoral dalam menangani masalah pemberdayaan usaha mikro-kecil, ditambah latar belakang pendidikan pengusaha kelas ini yang rata-rata masih rendah. Kemudian ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi; (3) Mereka merasa kurang percaya diri (akibat pendidikan yang rendah jika harus berhadapan dengan lembaga keuangan bank atau industri financial; (4) Masih kuatnya rentenir dan tengkulak yang mengorganisasi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Mereka boleh dikata “dibenci tetapi dibutuhkan”, karena mereka sudah ada sebelum lembaga keuangan masuk, bahkan sudah menjadi bagian dari sistem masyarakat Indonesia.

Bagi UMKM yang tidak memiliki agunan atau jaminan asset, tidak perlu khawatir. Menurut **M. Kwartono Adi** (2009 : 85-86), yaitu ada tiga trik agar mendapat modal usaha : (1) Usaha Anda sudah berjalan minimal 6 bulan, memiliki prospek bisnis yang bagus, dan menguntungkan (untuk modal awal, gunakan modal sendiri atau pinjaman Saudara; (2) Lalu ajukan modal ke lembaga keuangan non Bank dahulu, pada Karawang, 28 Februari 2023

umumnya mereka belum memberlakukan jaminan murni, tetapi mereka memberikan pelatihan, pendampingan dan bimbingan secara Cuma-Cuma. Namun jangan sekali-kali ceroboh mengelola modal tersebut, apalagi sampai macet. Hal ini akan menjadi catatan bagi pemberi modal dan nantinya tidak akan direkomendasikan kembali jika akan meminta modal ke lembaga keuangan lain, atau bank. (3) a. Jika lembaga keuangan itu semacam koperasi, Anda harus menjadi anggota tersebut. Tunjukkan bahwa Anda selalu membayar iuran dengan teratur dan menjalin relasi baik dengan petugas (Dalam hal ini karakter Anda sedang diuji;; (3) b. Jika mengajukan pinjaman kepada BUMN (program PKBL), perusahaan swasta (CSR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau melalui program pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Anda harus memiliki paguyuban atau kelompok atau asosiasi yang diketahui oleh kelurahan setempat. Umumnya mereka menggunakan bentuk jaminan secara sosial (*social collateral*), yaitu bahwa pengembalian pinjaman merupakan tanggungjawab bersama (tanggung renteng), meliputi unsur aparat setempat, anggota kelompok, anggota masyarakat.

Dari data tersebut di atas menunjukkan, bahwa bagi Indonesia sekarang ini , perberdayaan dan pengembangan UMKM sangat perlu dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan sudah saatnya bagi semua pihak ikut berperanserta menyukseskannya, apabila kita ingin tetap eksis /fokus pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan sekaligus dapat bersaing di era globalisasi sekarang ini.

Sebenarnya peran usaha kecil dan menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi nyata pada perputaran roda ekonomi nasional kita.(pada masa jaya-jayanya perusahaan besar dan konglomerasi pada masa Orde Baru tempo lalu). Menurut paparan **Sri Edi Swasono**,.dalam seminar di STIE IPWIJA Jakarta (26 Februari 2002) yang bertajuk, “*Situasi Ekonomi, Politik dan Keamanan*” Menurutnya, ...”sebenarnya peran usaha kecil dan menengah telah memberikan kontribusi yang nyata pada perputaran roda ekonomi kita, baik pada waktu sebelum terjadinya krisis maupun dalam masa krisis (tahun 1998).

Sebelum terjadi krisis,atau ketika sedang berjayanya perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan konglomerasi (baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing), akibat upah buruh yang relative murah tercipta kondisi masyarakat yang berdaya beli rendah (sebagian besar). Kemudian kelompok masyarakat yang berdaya beli rendah (atau buruh-buruh) ini, untuk mempertahankan hidupnya – hanya mengkonsumsi produk yang dihasilkan

Karawang, 28 Februari 2023

oleh perusahaan kecil dan menengah (atau UMKM). Lalu ketika krisis moneter (1998) memporakporandakan perusahaan-perusahaan besar /konglomerasi, sehingga terjadi PHK besar-besaran di sana sini, sehingga tak sedikit karyawan yang terkena PHK tersebut tertampung di sector usaha kecil dan menengah (atau UMKM), baik menjadi karyawan maupun membuka usaha sendiri sebagai wiraswastawan /wirausahawan.

Perlu disadari, bahwa masalah penciptaan kesempatan kerja dan usaha itu bukanlah menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga dunia swasta, atau individu yang memiliki kepekaan terhadap peluang berusaha. Peran utama pemerintah adalah menciptakan iklim usaha (pemertaaa kesempatan) yang lebih mendukung para pengusaha untuk menerapkan inisiatif dan kreativitasnya. Olrh karena itu, arah kebijakan pembangunan ekonomi di masa kini dan yang akan datang hendaknya lebih menjurus pada peningkatan kemampuan bersaing dan pembangunan yang berkualitas dengan nilai tambah yang semakin berbobot, berkaitan dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah perluasan kesempatan kerja dan usaha yang seyogianya lebih ditekankan untuk daerah pedesaan, dengan menitikberatkan pada peranan pemerintah daerah, baik di tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Karena di sanalah tinggal bagian terbesar penduduk negeri ini dengan keadaan ekonominya yang masih lemah.

Karena pada dasarnya permasalahan yang di hadapi oleh para UMKM, adalah yang menyangkut aspek lemahnya sumber daya manusia, organisasi, manajemen, permodalan dan pemasaran. Oleh karena itu untuk pemberdayaan dan pengembangannya mutlak diperlukan adanya pembinaan. Pada masa lalu (pada masa Orde Baru), pembinaannya hanya bersifat parsial, yakni hanya pembinaan terhadap sumber daya manusia saja dan setelah itu mereka dilepas. Maka tak heran, mereka yang telah mengalami pembinaan tetap bingung untuk mengatasi masalah-masalah seperti permodalan, pemasaran, organisasi, manajemen dan lainnya. Artinya pembinaan yang diperlukan adalah pembinaan terpadu yang meliputi semua aspek yang berda di lingkungan usaha kecil. Adapun upaya dalam pembinaan UMKM yang perlu dilakukan sebagai faktor pendukung antara lain :

Pertama; Menetapkan pengusaha /calon pengusaha yang menjadi sasaran pembinaan, dan pemberian keterampilan dan pengetahuan teknis bisang usaha yang akan digarap (industri, jasa dan perdagangan), serta aspek bisnis dan manajemen (pengetahuan manajemen, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran produk). Penetapan pengusaha/ calon

Karawang, 28 Februari 2023

pengusaha sasaran dimaksudkan untuk memudahkan pembuatan rencana biaya pembinaan dan pengendalian terhadap pengusaha-pengusaha binaan, mulai dari awal, selama proses operasional hingga pengembangan wilayahnya (terutama bagi yang sudah memiliki jenis usaha yang sudah berkembang). Pembinaan semacam ini seyogianya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Kedua; Menetapkan prioritas bidang usaha. Untuk itu perlu adanya informasi mengenai potensi yang ada di daerah (hasil pemetaan dan penelitian hasil potensi daerah dari Sabang sampai Merauke) sebagai dasar penentuan kelayakan jenis usaha yang akan digarap berdasarkan skala prioritas. Misalnya, kegiatan (jenis) industri pedesaan, industri pertanian, jasa dan perdagangan. Hasil pemetaan dan penelitian ini juga dapat dijadikan dasar oleh masing-masing pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan investasi berbagai sector maupun pengembangan industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ketiga; mengintensipkan peranan bapak angkat bagi calon pengusaha atau pengusaha. Selama ini peranan bapak angkat atau sponsor (oleh Bank dan perusahaan besar) tempo lalu (pada masa Orde Baru) cukup berhasil dalam upaya mengentaskan usaha kecil dan menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri. Untuk berkembang menjadi usaha besar. Bapak angkat ini berperan, selain memberi modal juga melakukan studi kelayakan usaha dan memberikan pengetahuan manajemen kepada pengusaha kecil yang disponsorinya.

Keempat ; Perluasan dan pengembangan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank. Di mana penyediaan modal investasi untuk daerah-daerah yang memiliki potensi usaha perlu lebih ditingkatkan, baik yang bersumber dari pemerintah dan swasta maupun bersumber dari luar negeri , sehingga para pengusaha kecil dan menengah di daerah diharapkan dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara optimal.

Salah satu strategi visi dalam membangun kunci sukses perusahaan UMKM, menurut pendiri dan Presiden Komisaris LP3I Grup, **Syahrial Yusuf** (2011 : 77) mengemukakan “Kunci sukses yang paling penting ialah mempunyai visi, yakin dengan bayangan atau gambaran masa depan yang akan diraih . Visi juga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melihat realitas masa depan, untuk menciptakan dan menemukan apa yang belum ada, dan menjadikan diri yang saat ini belum terwujud. Pengusaha sukses selalu bisa membuat gambaran yang konkret tentang wujud masa depan dirinya yang akan diraih. Apakah itu masa

depan untuk lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, atau bahkan lima puluh tahun mendatang.

Ia senantiasa melakukan aktivitas pribadi dan usaha berdasarkan visi dengan membuat rencana-rencana dan strategi masa depan secara hati-hati dan konsisten. Rencana dan strategi tersebut bukan sekadar dicatat dalam buku atau diumumkan kepada staf dan karyawan di perusahaan, melainkan dilaksanakan melalui penyusunan sistem dan mekanisme kerja yang tepat, pengaturan waktu yang jelas, dan aturan-aturan yang ditaati. Sebagai seorang pemimpin di perusahaan ia akan menjadi panutan. Jika ia mengatakan bahwa visi perusahaan ini sedang mengarah ke masa depan A, secara konsisten, ia akan menjalankan roda usaha dan tingkah laku pribadi yang mengarah ketitik sasaran A. Bukan hanya itu, konsep visi ini juga disosialisasikan kepada staf dan karyawan dalam bentuk penataran dan pelatihan. Bisa juga dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis yang menggambarkan visi dan misi perusahaan yang ditempel di ruang kantor dan tempat-tempat di mana karyawan mudah membacanya. Harapannya, visi dan misi tersebut bisa dipahami dan membangkitkan semangat karyawan untuk mendukung mengenai visi masa depan perusahaan.

Menurut **Sandiaga Uno**, dalam **Nor Islafatun** (2014 : 172-173), bahwa anak muda memiliki sikap dinamis dan penuh gairah atau semangat. Dinamisme dan semangat itu pada nantinya akan membuat masa depan dunia wirausaha di kalangan pemuda menjadi lebih cerah, terlebih jika mengingat jumlah pemuda yang ada di Indonesia saat ini. Menurutnya terlalu sayang jika usia ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Populasi Indonesia saat ini didominasi oleh populasi berumur produktif (67%). Ini berarti, kelak Indonesia punya kesempatan untuk memanfaatkan potensi ini setidaknya hingga tahun 2030.

Gambaran mengenai mahadaya pemuda, Jepang, sebuah Negara yang terkenal dengan etos kerja masyarakatnya yang luar biasa tinggi itu pernah berada dalam situasi yang sama dengan Indonesia pada tahun '60/'70 –an. Pada tahun-tahun tersebut, jumlah pemuda mendominasi Negara Jepang. Begitu juga dengan Negara Korea Selatan. Di tahun 1970/1980-an, total penduduk Korea Selatan di dominasi oleh para pemuda. Pada saat itu, baik Jepang dan Korea selatan benar-benar memanfaatkan asset yang dimilikinya itu; tenaga-tenaga produktif itu diberdayakan dengan maksimal. Kita semua tahu bagaimana mereka berhasil memanfaatkan potensi generasi muda mereka dalam membangun korporasi –korporasi yang bisa bersaing di pasar global. Hasilnya pun bisa kita lihat, saat ini negeri sakura itu telah

Karawang, 28 Februari 2023

berhasil menguasai dunia lokomotif. Produk-produk seperti pompa air, sepeda motor, dan mobil buatan Jepang telah berhasil merambah pasar dunia.

Untuk itu, Indonesia juga harus dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan tersebut. Yaitu melakukan hal yang sama (dengan Jepang dan Korea Selatan) untuk memaksimalkan sumber daya para pemuda tersebut. Jika tidak, kesempatan ini sudah bisa dipastikan akan hilang begitu saja ditelan waktu, dan masa jaya tahun 2030 akan menjadi hanya tinggal impian saja..

Bagi bangsa Indonesia, dalam era perdagangan bebas ini, tiada pilihan lain kecuali mengagendakan atau memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan pendukung utamanya. Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi sering dibarengi dengan munculnya masalah-masalah politik dalam negeri yang cenderung menjerumuskan Negara dunia ketiga pada konflik yang tidak berkesudahan. Dengan kata lain, konflik politik yang masih menjadi problem serius harus segera diselesaikan, karena pembangunan politik dan pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dalam suatu keterkaitan yang proporsional.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah politik industri nasional. Politik industri adalah suatu standar kebijakan bidang industri yang bersifat permanen dan konsisten yang merupakan acuan utama bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan industri nasional. Dengan adanya politik industri ini diharapkan tidak akan terjadi perubahan-perubahan mendasar yang sangat merugikan dalam pelaksanaan pembangunan industri nasional.

Harus diakui, pada saat era pasar bebas seperti sekarang ini, Indonesia masih belum siap sepenuhnya, masih belum siap dalam banyak hal. Akan tetapi bukan berarti karena hal itu lalu kita tak perlu terlibat dalam pasar global. Yang penting adalah, bagaimana upaya kita mempersiapkan UMKM - sebagai kekuatan utama yang memutar roda ekonomi nasional- memasuki kondisi yang siap bersaing bebas, untuk mencapai keunggulan (mutu), sehingga pada gilirannya kelak Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan tidak bergantung pada Negara lain.

Daftar Pustaka :

1. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, **Undang-undang UMKM; Undang-Karawang**, 28 Februari 2023

- undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**
2. Internet, **Kebijakan ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan**, dalam www.smeru.or.id, Sorotan/simulasi/diakses pada 01/08/2022.
 3. Internet, **Jumlah penduduk Indonesia**, dalam www.databoks.kata.data.co.id, diakses pada 01/08/2022.
 4. Jen Z.A. Hans, PhD, **(Paper) Seven Habits, Kanzen, dan Ajaran Islam**, Ketua Program Magister Manajemn STIE IPWIJA, 2001, Jakarta.
 5. KPHN Hoedhiono Kadarisman, DR, **Pola Inkubator –Pedoman Pengentasan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi**, PT. IBEC dan PCAC, cetakan pertama, 1997, Jakarta.
 6. Kwartono Adi. M, **Kiat Sukses Berburu Modal UMKM**, Penerbit Raih Asa Sukses, 2009, Jakarta.
 7. Mochtar Pabotinggi, **Seminar LIPI – Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru**, 15 Januari 1994, Jakarta.
 8. Nor Islafatun, **Sandiaga Uno – “ini Baru Permulaan”**, Diterbitkan oleh KOBIS, 2014, Yogyakarta.
 9. Sri Edi Swasono, Prof. DR., **Seminar STIE IPWIJA – Situasi Ekonomi, Politik dan Keamanan**, 26 Februari 2002, Jakarta.
 10. Syahrial Yusuf, DR., Pendiri dan Presiden Komisaris LP3I Group, **Dari Titik Nol – Strategi Ampuh Menjadi Pengusaha Sukses**, 2011, Jakarta.
 11. Tim Redaksi LP3ES, **Anak Bangsa menggugat – Nasionalisme, Kemandirian dan Kewirausahaan**, Pustaka LP3ES, 2003, Jakarta.
 12. Himpunan Peraturan Perundang-undangan, **Undang-undang UMKM : UU. RI No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta.